2445

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

JALAN TAMAN SUROPATI NO. 2 JAKARTA PUSAT 103010
TELEPON (021) 31936207; FAKSIMILE (021) 3145374
www. bappenas.go.id

Nomor : 389/P.01/03/2021 16 Maret 2021
Sifat : Penting
Lampiran : Satu berkas
Hal : **Booklet dan Poster Kebijakan Beasiswa Pusbindiklatren 2021**

Yth.
1. Gubernur Seluruh Indonesia
2. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia
3. Kepala Biro SDM/Kepegawaian Kementerian/Lembaga

di
Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian PPN/Bappenas, Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas secara teknis melaksanakan peningkatan kompetensi ASN pusat dan daerah melalui program beasiswa Pendidikan dan Pelatihan. Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan Booklet dan Poster Kebijakan Beasiswa Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas tahun 2021. Berkaitan dengan hal dimaksud, mohon perkenan Bapak/Ibu sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (PPKD) dan pengelola teknis kepegawaian Kementerian/Lembaga untuk dapat menyebarluaskan Booklet dan Poster Program beasiswa dimaksud kepada para ASN yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan,
dan Pelatihan Perencana

Gusnika

Tembusan:
Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas

Kementerian PPN/ Bappenas | Pusbindiklatren

PROGRAM BEASISWA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS 2021

PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERENCANA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

www.pusbindiklatren.bappenas.go.id
Pusbindiklatren Bappenas
@pusbindiklatren



PROGRAM BEASISWA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS bertujuan mendukung upaya peningkatan kapasitas institusi perencanaan pemerintah di pusat dan daerah (*institutional capacity building*), dengan menggunakan *institutional approach*, yaitu setiap permohonan menjadi calon penerima beasiswa harus sesuai dengan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di instansinya.

Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas **KHUSUS DISEDIAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)** yang bekerja di Kementerian PPN/ Bappenas, unit perencanaan di kementerian/lembaga, Bappeda atau instansi setingkat yang menangani perencanaan, unit perencanaan di organisasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, dan/atau unit kerja lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan.

INFO LEBIH LANJUT, HUBUNGI: 021-319 28280/319 28285/319 28279
PUSBINDIKLATREN@BAPPENAS.GO.ID

BEASISWA PROGRAM PENDIDIKAN

- S-2 DALAM NEGERI
- S-2 AFIRMASI DALAM NEGERI
- S-2 TEMATIK DALAM NEGERI *SMART CITY*
- *SPLIT-SITE MASTER PROGRAM* (SSMP)

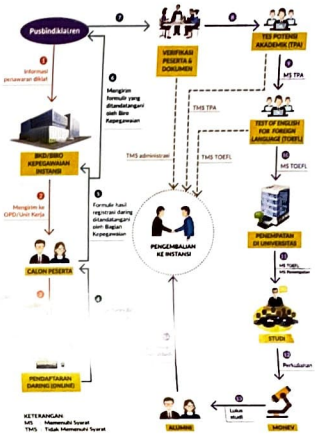


PERSYARATAN UMUM:

1. Belum pernah mengambil/memiliki pendidikan S-2.
2. Telah diangkat menjadi PNS 100% minimal 1 tahun dengan pangkat/golongan minimal III/a.
3. Batas usia maksimal 37 tahun (khusus S-2 Afirmasi Dalam Negeri, batas usia maksimal 42 tahun).
4. IPK minimal 2,75 (khusus S-2 Afirmasi Dalam Negeri, IPK minimal 2,50)
5. Pelamar yang diprioritaskan adalah (a) fungsional perencana; (b) perencana di instansi perencanaan atau yang bekerja di unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan; dan (c) PNS yang uraian pekerjaannya berhubungan dengan perencanaan pembangunan.
6. Diusulkan secara resmi oleh instansi asal melalui pejabat pembina kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Pimpinan Pratama (Eselon II) yang menangani kepegawaian. Surat usulan harus menyebutkan nama-nama pegawai yang diusulkan dan program/topik beasiswa yang diminati.
7. Formulir pendaftaran harus dilengkapi dokumen Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) yang terdapat di instansi masing-masing.

++ informasi selengkapnya dapat disimak di situs web Pusbindiklatren Bappenas

PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN PUSBINDIKLATREN BAPPENAS



BEASISWA PROGRAM PELATIHAN

- PELATIHAN TEKNIS
- *STAFF ENHANCEMENT*
- FORUM ILMIAH INTERNASIONAL
- *ACADEMIC EXCHANGE*



PILIHAN TOPIK PELATIHAN TEKNIS:
Individu: *City Planning, Monitoring* dan Evaluasi, Perencanaan dan Penganggaran;
Berkelompok: KPBU/PPP, PPD-RPJMD, Perencanaan Lingkungan, Perencanaan Pengelolaan Bencana, Kelayakan Proyek, LERD, PPD, Renstra

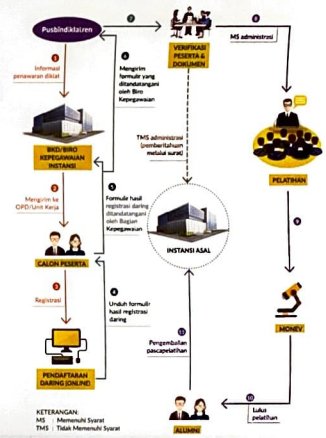
- Program ***Staff Enhancement*** dan ***Academic Exchange*** bekerja sama dengan universitas di Jepang
- **Forum Ilmiah Internasional** dapat diikuti di Indonesia, Jepang, Negara Kawasan Asia Pasifik, atau Australia

PERSYARATAN UMUM:

1. Peserta merupakan PNS yang bekerja di unit kerja perencanaan minimal 1 tahun.
2. Calon peserta diusulkan oleh instansi asalnya melalui pejabat pembina kepegawaian (minimal Pejabat Pimpinan Pratama/Eselon II)
3. Pendidikan minimal S-1/D-4 dengan golongan minimal III/a.
4. Batas usia maksima 2 tahun sebelum pensiun (khusus *Staff Enhancement*, batas usia maksimal 5 tahun sebelum pensiun).
5. Peserta *Staff Enhancement* wajib membuat proposal dalam bahasa Inggris sesuai topik yang dipilih.

++ informasi selengkapnya dapat disimak di situs web Pusbindiklatren Bappenas

PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN PUSBINDIKLATREN BAPPENAS



BEASISWA PROGRAM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA (FP)

PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA AHLI PERTAMA 7 MINGGU

UJI KOMPETENSI PERENCANA AHLI MUDA/AHLI MADYA/AHLI UTAMA 120 MENIT*

** kecuali untuk Perencana Ahli Utama, dengan mekanisme seminar policy paper*

WORKSHOP PENILAIAN ANGKA KREDIT (PAK) 5 HARI

WORKSHOP ADMINISTRASI PENILAIAN ANGKA KREDIT (APAK) 3 HARI

PERSYARATAN UMUM PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA (FP) DAN UJI KOMPETENSI:

1. Pendidikan minimal strata 1 (S-1) atau diploma 4 (D-4) dari semua disiplin ilmu.
2. Berasal dari unit kerja perencanaan.
3. PNS 100% dengan masa kerja 1 tahun (sejak menjadi PNS 100%).
4. Batas usia setinggi-tingginya pada saat mengikuti Uji Kompetensi:
   - 51 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional perencana ahli pertama dan ahli muda;
   - 53 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional perencana ahli madya; dan
   - 58 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional perencana ahli utama. Bagi JPT yang akan pindah jabatan, dapat mengikuti ketentuan di tautan **bit.ly/setneg-b143-2018**
5. PNS pindah jabatan selain butir (4) di atas, juga harus melampirkan surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan, sekurang-kurangnya 2 tahun yang diketahui oleh atasan langsungnya minimal Pejabat Eselon II.
6. Surat usulan harus ditandatangani oleh serendah-rendahnya Pejabat Eselon II yang bertanggung jawab menangani kepegawaian.
7. Menyertakan surat pernyataan formasi kebutuhan jabatan fungsional perencana dari kepegawaian.
8. Bagi Perencana yang akan naik jabatan selain butir (6) di atas, juga wajib melampirkan selain SK pengangkatan ke dalam JFP dan salinan Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir.
9. Melampirkan surat rekomendasi dari pengelola kepegawaian perihal pengangkatan dalam JFP selambat-lambatnya 6 bulan sejak persyaratan untuk naik pangkat/jabatan telah terpenuhi.
10. Melampirkan surat pernyataan dari pengelola kepegawaian yang menyatakan bahwa sudah tidak ada alumni pelatihan fungsional perencana yang belum diangkat dalam JFP.
11. Mengisi dan melengkapi data-data sesuai dengan formulir isian daring yang ada di situs web Pusbindiklatren Bappenas dan mengirim berkas kelengkapan pendaftaran pelatihan.
12. Bagi para calon peserta yang sudah pernah mendaftar pada tahun sebelumnya, tetapi belum terpanggil, silahkan mendaftar kembali dan melengkapi dokumen sesuai ketentuan dan persyaratan di atas.
13. Dokumen kelengkapan persyaratan pelatihan yang tidak lengkap dianggap tidak memenuhi syarat administrasi dan tidak akan diproses lebih lanjut.

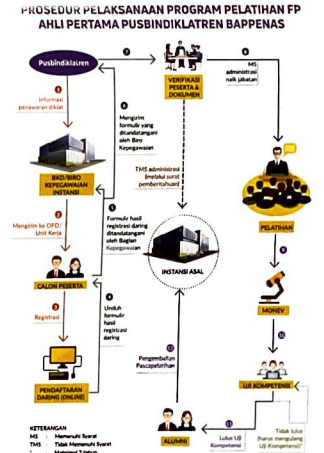
PERSYARATAN UMUM *WORKSHOP* PAK DAN *WORKSHOP* APAK:

1. Surat usulan ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab menangani kepegawaian minimal Pejabat Eselon II;
2. Mengisi dan melengkapi data-data sesuai dengan formulir isian daring yang ada di laman www.pusbindiklatren.bappenas.go.id;
3. Melampirkan salinan SK PNS dan ijazah terakhir;
4. Mengirimkan berkas kelengkapan pendaftaran diklat sebagai berikut: untuk butir (1) dan (2) adalah dokumen asli sedangkan butir (3) adalah salinan/ fotokopi dokumen (data yang tidak lengkap dianggap tidak memenuhi syarat administrasi dan tidak akan diproses lebih lanjut).



++ informasi selengkapnya dapat disimak di situs web Pusbindiklatren Bappenas

PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN FP AHLI PERTAMA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS



Kementerian PPN/ Bappenas | Pusbindiklatren



BOOKLET

PROGRAM BEASISWA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS

2021

BEASISWA PROGRAM PENDIDIKAN

BEASISWA PROGRAM PELATIHAN

BEASISWA PROGRAM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

BEASISWA
PUSBINDIKLATREN BAPPENAS





Program Beasiswa Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bertujuan mendukung upaya peningkatan kapasitas institusi perencanaan pemerintah di pusat dan daerah (*institutional capacity building*), dengan menggunakan *institutional approach*, yaitu setiap permohonan menjadi calon penerima beasiswa harus sesuai dengan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di instansinya.

Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas khusus disediakan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Kementerian PPN/Bappenas, unit perencanaan di kementerian/lembaga, Bappeda atau instansi setingkat yang menangani perencanaan, unit perencanaan di organisasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, dan/atau unit kerja lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan.

Daftar Isi

SEKILAS BEASISWA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS ____ 2

BEASISWA PROGRAM PENDIDIKAN ____ 3

BEASISWA PROGRAM PELATIHAN ____ 9

BEASISWA PROGRAM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA ____ 15

PENDAFTARAN PROGRAM BEASISWA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS ____ 22

BEASISWA PROGRAM PENDIDIKAN

BEASISWA S-2 DALAM NEGERI

BEASISWA S-2 AFIRMASI DALAM NEGERI

BEASISWA S-2 TEMATIK DALAM NEGERI *SMART CITY*

BEASISWA *SPLIT-SITE MASTER PROGRAM* (SSMP)



PROGRAM PENDIDIKAN

S-2 DALAM NEGERI

Program Beasiswa S-2 Dalam Negeri merupakan program beasiswa reguler yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren Bappenas. Program beasiswa ini bekerja sama dengan 25 program studi dari berbagai universitas negeri terbaik di Indonesia dengan **durasi studi** 18 bulan.

S-2 AFIRMASI DALAM NEGERI

Program Beasiswa S-2 Afirmasi **Dalam Negeri** merupakan program beasiswa yang diselenggarakan dalam **rangka peningkatan kapasitas PNS di Kawasan** Timur **Indonesia** (KTI). **Target peserta program Beasiswa S-2 Afirmasi Dalam** Negeri adalah **PNS unit kerja perencanan dari kabupaten/kota/provinsi di wilayah** Kalimantan Utara, **Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan** Papua Barat, serta daerah **sasaran lain yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren.**

S-2 TEMATIK DALAM NEGERI *SMART CITY*

Program **Beasiswa S-2 Tematik Dalam Negeri** *Smart City* merupakan program yang diselenggarakan dalam rangka mendukung gerakan membangun *smart city* yang dikembangkan oleh beberapa kementerian/lembaga melalui "Program Gerakan Menuju 100 *Smart City*". Program Beasiswa S-2 Tematik Dalam Negeri *Smart City* dilaksanakan untuk memfasilitasi penyusunan *Masterplan Smart City* agar dapat lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun akselerasi pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Program Beasiswa S-2 Tematik Dalam Negeri *Smart City* dirancang sebagai program 24 bulan dengan kegiatan magang di salah satu kota/kabupaten/institusi yang telah menyelenggarakan program *Smart City*.

SPLIT-SITE MASTER PROGRAM (SSMP)

Beasiswa *Split-Site Master Program* yang bekerja sama dengan Australia Awards in Indonesia (AAI) merupakan program *master* (S-2) yang diselenggarakan di salah satu universitas di Indonesia dan salah satu universitas di Australia. Peserta dalam program ini akan mengikuti perkuliahan selama satu tahun di Indonesia dan satu tahun berikutnya di Australia, serta berhak mendapatkan dua gelar.

PILIHAN PROGRAM STUDI

S-2 DALAM NEGERI

1. Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Syiah Kuala;
2. Magister Ekonomi, Universitas Andalas;
3. Magister Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya;
4. Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Universitas Indonesia;
5. Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Universitas Indonesia;
6. Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia;
7. Magister Ilmu Perencanaan Wilayah, Institut Pertanian Bogor;
8. Magister Manajemen Pembangunan Daerah, Institut Pertanian Bogor;
9. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung;
10. Magister Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung;
11. Magister Transportasi, Institut Teknologi Bandung;
12. Magister Ekonomi Terapan, Universitas Padjadjaran;
13. Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Padjadjaran;
14. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro;
15. Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro;
16. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada;
17. Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada;
18. Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada;
19. Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Universitas Gadjah Mada
20. Magister Sistem dan Teknik Transportasi, Universitas Gadjah Mada;
21. Magister Ilmu Lingkungan, dengan Peminatan Geo-Informasi untuk Manajemen Bencana, Universitas Gadjah Mada;
22. Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya;
23. Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya;
24. Magister Pengelolaan dan Sumber Daya Lingkungan Pembangunan, Universitas Brawijaya;
25. Program Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, dengan Peminatan Manajemen Perencanaan, Universitas Hasanuddin.

S-2 AFIRMASI DALAM NEGERI

1. Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya
2. Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada
3. Magister Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya

S-2 TEMATIK DALAM NEGERI SMART CITY

1. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung
2. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada
3. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro

SPLIT-SITE MASTER PROGRAM (SSMP)

1. Magister Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya kerja sama dengan Master of Applied Economics Macquarie University
2. Magister Sosiologi Universitas Gadjah Mada kerja sama dengan Master of Social Policy University of Melbourne
3. Magister Pariwisata Universitas Udayana kerja sama dengan Master of International Tourism and Hospitality Management Griffith University

PERSYARATAN UMUM

1. Belum pernah mengambil/memiliki pendidikan S-2.
2. Pelamar yang diprioritaskan adalah (a) fungsional perencana; (b) perencana di instansi perencanaan atau yang bekerja di unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan; dan (c) PNS yang uraian pekerjaannya berhubungan dengan perencanaan pembangunan.
3. Diusulkan secara resmi oleh instansi asal melalui pejabat pembina kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Pimpinan Pratama (Eselon II) yang menangani kepegawaian. Surat usulan harus menyebutkan nama-nama pegawai yang diusulkan dan program/topik beasiswa yang diminati.
4. Formulir pendaftaran harus dilengkapi dokumen Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) yang terdapat di instansi masing-masing.

PERSYARATAN KHUSUS

Keterangan	S-2 Dalam Negeri & S-2 Tematik Dalam Negeri *Smart City*	S-2 Afirmasi Dalam Negeri	*Split-Site Master Program* (SSMP)
SYARAT ADMINISTRATIF A. Pengusulan dari Instansi	Eselon II Bidang Kepegawaian	Eselon II Bidang Kepegawaian	Eselon II Bidang Kepegawaian
B. Unit Kerja	Perencanaan	Perencanaan	Perencanaan
C. PNS 100%, Golongan III/a (minimal)	1 tahun	1 tahun	1 tahun
D. Strata Pendidikan Minimal	D-4/S-1*	D-4/S1*	D-4/S1*
E. Minimal Tahun Lulus D-4/S-1	2 tahun	2 tahun	2 tahun
F. Umur Maksimal**	37 tahun**	40 tahun**	37 tahun**
G. IPK Minimal	2,75	2,50	2,90
H. Surat Keterangan Rencana Pengembangan SDM	Eselon II Bidang Kepegawaian	Eselon II Bidang Kepegawaian	Eselon II Bidang Kepegawaian
SELEKSI NASIONAL A. Tes Potensi Akademik (TPA) Pusat	565	-	565
Pusat Luar Jawa	525	-	525
Pemda Jawa	525	-	525
Pemda Luar Jawa	500	400	500
B. TOEFL Seleksi Minimal	450	400	500
IBT TOEFL/IELTS Setelah EAP	-	-	90/6,5
C. Wawancara	Menunjukkan Komitmen	Menunjukkan Komitmen	Menunjukkan Komitmen

KETERANGAN:

* Hanya beberapa program studi yang menerima calon peserta dengan latar belakang pendidikan D-4.

** Batas maksimal usia pendaftar per 1 Agustus 2020.

PROGRAM PERSIAPAN BAHASA

1. ***BASIC ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES* (BEAP)**

   Program Pelatihan Bahasa Inggris khusus untuk peserta dari Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebagai persiapan untuk mengikuti Beasiswa Afirmasi Pusbindiklatren Bappenas.

2. ***BASIC JAPANESE LANGUAGE TRAINING* (BJLT)**

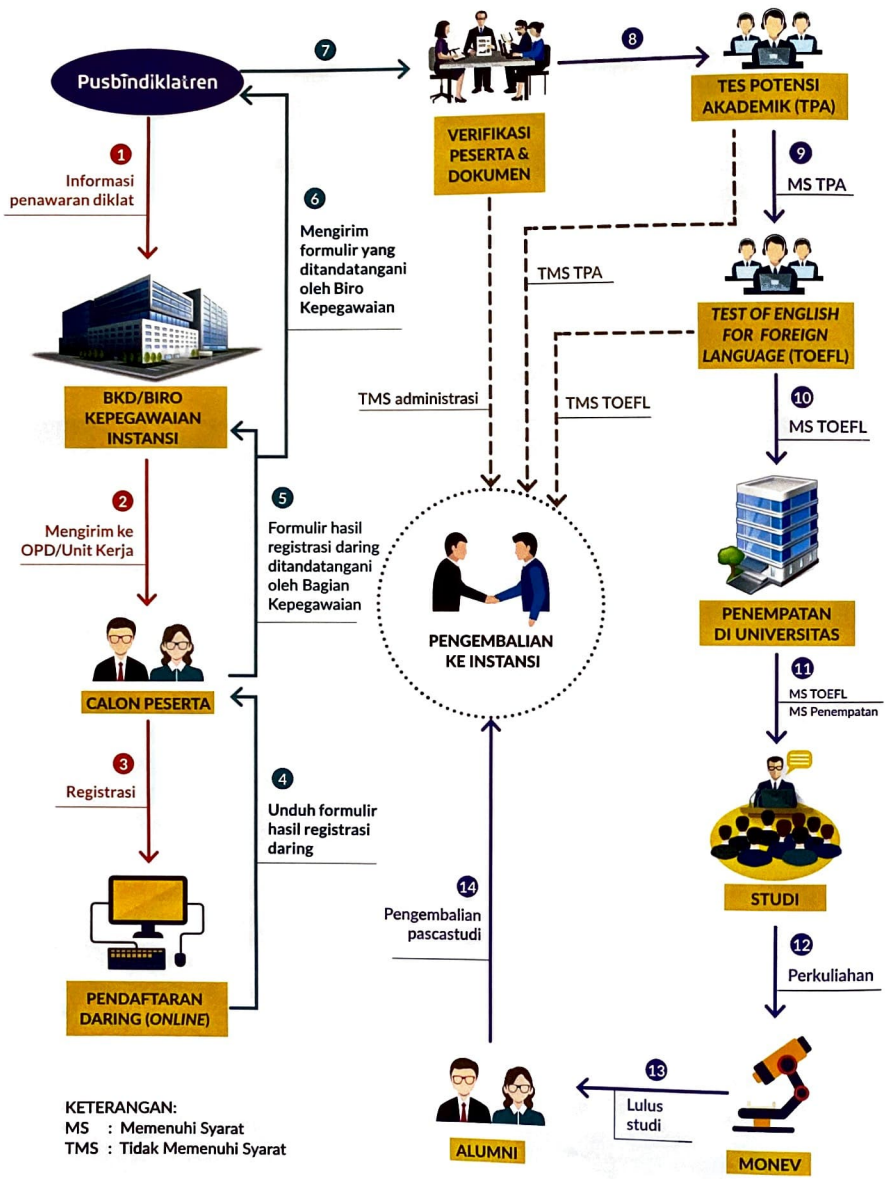
   Program persiapan bahasa Jepang yang dilaksanakan selama 6 minggu untuk peserta program beasiswa pendidikan program S-2 Luar Negeri Jepang dan S-2 *Linkage* Jepang.

JADWAL PELAKSANAAN

KEGIATAN	JADWAL
Penawaran Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas 2021	17 September 2020
Batas Waktu Registrasi Daring	30 Oktober 2020
Batas Waktu Pengiriman Berkas Peserta (Cap Pos)	30 Oktober 2020
Pemanggilan Peserta Seleksi Nasional TPA 2021	9 November 2020
Seleksi Nasional TPA 2021	19—25 November 2020
Pemanggilan Peserta Seleksi Nasional TOEFL 2021	24 November 2020
Seleksi Nasional TOEFL 2021	26—27 November 2020
Penawaran Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2021 Gelombang II dan Penawaran *Split-Site Master Program* Tahun 2021	7 Desember 2020
Seleksi Nasional TPA dan TOEFL Tahun 2021 Khusus *Split-Site Master Program*	Februari 2021
Penawaran Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2021 (Program S-2 Afirmasi Dalam Negeri)	Februari 2021
Seleksi Nasional TPA Tahun 2021 Gelombang II	Maret 2021
Seleksi Nasional TOEFL Tahun 2021 Gelombang II	April 2021
Seleksi Nasional TPA dan TOEFL Tahun 2021 S-2 Afirmasi Dalam Negeri	April 2021
Pengumuman Program Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2021	Mei 2021

* Jika terjadi perubahan jadwal, akan diinformasikan melalui situs *web* Pusbindiklatren Bappenas

PROSEDUR PELAKSANAAN



KETERANGAN:
MS : Memenuhi Syarat
TMS : Tidak Memenuhi Syarat

BEASISWA PROGRAM PELATIHAN

- PELATIHAN TEKNIS
- *STAFF ENHANCEMENT*
- FORUM ILMIAH INTERNASIONAL
- *ACADEMIC EXCHANGE*



PROGRAM PELATIHAN DALAM NEGERI

PELATIHAN TEKNIS

Pelatihan Teknis bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perencana pusat dan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan. Secara umum, terdapat 3 pelatihan untuk program pelatihan individual dan 8 pelatihan untuk program pelatihan berkelompok.

A. Program Pelatihan Individual

1. **Pelatihan *City Planning***
   Program pelatihan dirancang selama kurang lebih 10 hari, bertujuan untuk menambah pemahaman peserta perihal perencanaan kota, regulasi perencanaan kota baru serta proses identifikasi permasalahan kota.

2. **Pelatihan *Monitoring* dan Evaluasi**
   Program pelatihan dirancang selama kurang lebih 10 hari, bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan peserta dalam melakukan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi.

3. **Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran**
   Program pelatihan dirancang selama kurang lebih 10 hari, bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kemampuan, serta keterampilan peserta pelatihan perencanaan dan penganggaran sehingga dapat menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran dengan baik.

B. Program Pelatihan Berkelompok

1. **Pelatihan Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)/*Public Private Partnership* (PPP)**
   Program pelatihan dirancang selama kurang lebih 10 hari dan diikuti secara berkelompok (2—5 orang dari unit kerja/OPD/instansi yang sama) bertujuan untuk membuka perspektif daerah tentang potensi alternatif pembiayaan di luar anggaran pembangunan yang bersumber dari APBN/APBD, khususnya peluang bekerja sama dengan swasta/badan dalam usaha. Selain itu, pelatihan PPP bertujuan untuk menambah pengetahuan kepada aparat daerah dalam memutuskan prioritas pembangunan dan pilihan sumber pembiayaannya dalam peningkatan layanan publik.

2. **Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PPD-RPJMD)**
   Program pelatihan dirancang selama kurang lebih 10 hari kerja dan diikuti secara berkelompok (2—5 orang dari unit kerja/OPD/instansi yang sama) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi PNS pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, Pelatihan PPD-RPJMD juga bertujuan untuk meningkatkan pengertian dan pemahaman peserta tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

3. **Pelatihan Perencanaan Lingkungan**
   Program pelatihan yang dirancang selama kurang lebih 10 hari dan diikuti secara berkelompok (2—5 orang dari unit kerja/OPD/instansi yang sama), yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur pemerintah mengenai *Green Economy* dan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon. Selain itu, Pelatihan Perencanaan Lingkungan juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dalam mengarusutamakan dan mengintegrasikan isu strategis bidang lingkungan hidup, perubahan iklim, dan ketahanan bencana ke dalam perencanaan pembangunan sektoral dan daerah.

4. **Pelatihan Perencanaan Pengelolaan Bencana**
   Program pelatihan yang dirancang selama kurang lebih 10 hari dan diikuti secara berkelompok (2—5 orang dari unit kerja/OPD/instansi yang sama), yang bertujuan untuk membangun sistem yang terintegrasi dalam penanggulangan bencana dan manajemen pengurangan risiko bencana/mitigasi bencana. Selain itu, peserta juga diharapkan memahami dan menguasai konsep dasar penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana di daerahnya masing-masing.

5. **Pelatihan Kelayakan Proyek**
   Program pelatihan yang dirancang selama kurang lebih 10 hari dan diikuti secara berkelompok (2—5 orang dari unit kerja/OPD/instansi yang sama), yang bertujuan untuk menjadi jalan pembuka membuka jalan untuk meningkatkan kecakapan/kapasitas perencana dalam menilai dan menyusun dokumen (usulan) proyek yang disampaikan ke pengambil kebijakan proyek-proyek pembangunan secara umum.

6. **Pelatihan *Local Economic Regional Development* (LERD)**
   Program pelatihan yang dirancang selama kurang lebih 10 hari dan diikuti secara berkelompok (2—5 orang dari unit kerja/OPD/instansi yang sama), yang bertujuan untuk mendorong terciptanya perencanaan yang semakin efektif dan efisien dalam mengembangkan perekonomian daerah. Salah satu hal yang dilakukan, yakni melalui peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi lokal, meningkatkan produktivitas komoditas unggulan, dan meningkatkan kompetensi perencana pemerintah khususnya dalam mendesain institusi, melakukan pemetaan produk/komoditas unggulan daerah, dan melakukan implementasi rencana pengembangan yang telah ditentukan.

7. **Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)**
   Program pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) dirancang selama kurang lebih 5 hari dan diikuti secara berkelompok (2—5 orang dari unit kerja/OPD/instansi yang sama) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi PNS pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pelatihan PPD bertujuan untuk meningkatkan pengertian dan pemahaman peserta tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dengan adanya pemahaman sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah maka diharapkan sinergi pembangunan pusat dan daerah akan semakin baik.

8. **Pelatihan Rencana Strategis (Renstra)**
   Program pelatihan Rencana Strategis dirancang selama kurang lebih 5 hari dan diikuti secara berkelompok (2—5 orang dari unit kerja/OPD/instansi yang sama) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi peserta dalam merumuskan Renstra OPD sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017, dan memberikan pemahaman tentang konsep manajemen strategis dimana Renstra merupakan bagiannya.

PROGRAM PELATIHAN LUAR NEGERI

STAFF ENHANCEMENT

Program pelatihan non-konvensional dengan bekerja atau melakukan *joint research* di universitas di Jepang. Topik *Staff Enhancement*, yaitu *Regional and Urban Planning*, *Waste Management*, dan *Local Economic Regional Development* (LERD).

FORUM ILMIAH INTERNASIONAL

Program bagi PNS dari unit kerja perencanaan untuk memaparkan karya tulis, hasil penelitian, maupun tesis/disertasi dalam forum seminar/*workshop*/konferensi internasional di Indonesia, Jepang, negara-negara di kawasan Asia Pasifik, serta Australia sebagai media diseminasi dalam skala yang lebih luas agar dapat dikembangkan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pada kemudian hari.

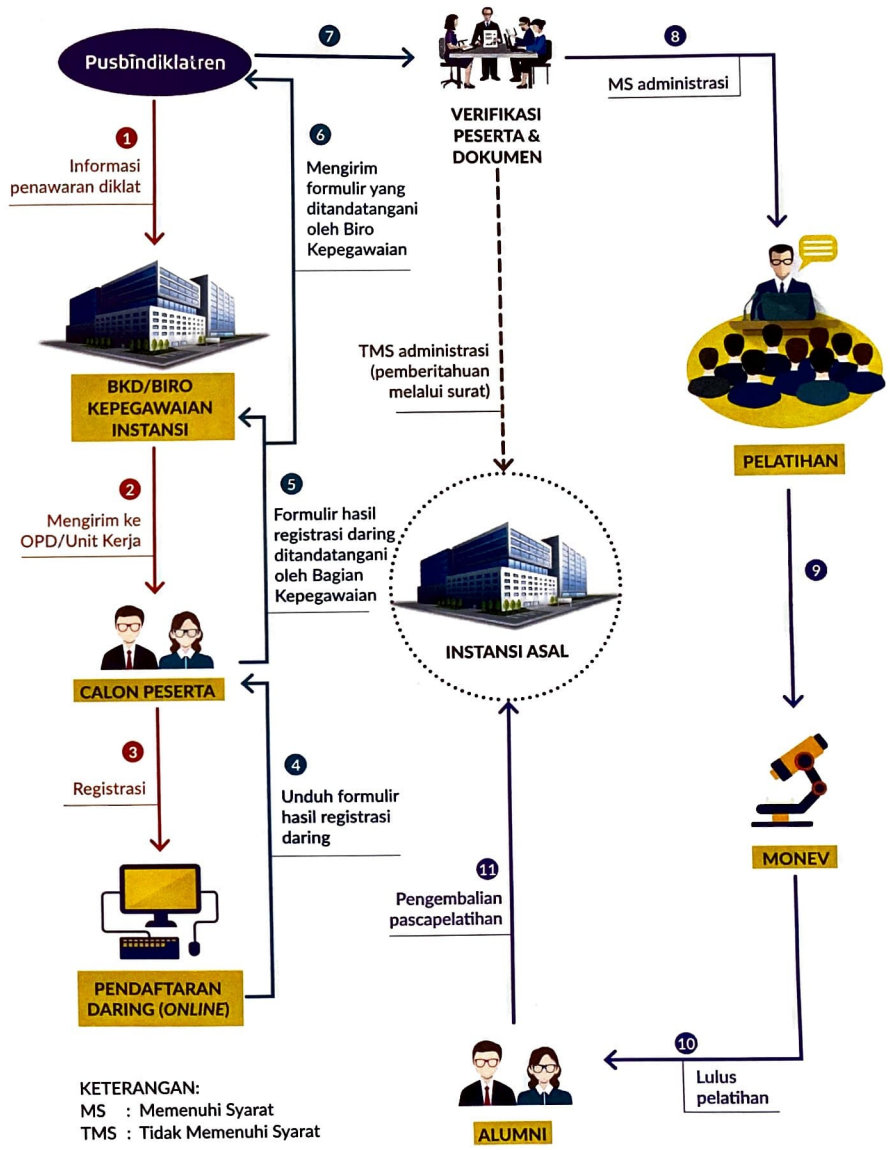
ACADEMIC EXCHANGE

Program ini diperuntukkan bagi dosen dari program studi *linkage* yang bekerja sama dengan Pusbindiklatren untuk mengajar di universitas di Indonesia dan di Jepang.

PERSYARATAN KHUSUS

No.	Persyaratan	PROGRAM PELATIHAN		
		Pelatihan Teknis	*Staff Enhancement*	Forum Ilmiah Internasional
1	Pengusulan dari Instansi (BKD/Pembina Kepegawaian)	Minimal Pejabat Pimpinan Pratama (Eselon II)	Minimal Pejabat Pimpinan Pratama (Eselon II)	Minimal Pejabat Pimpinan Pratama (Eselon II)
2	Unit Kerja (Minimal 1 Tahun)	Perencanaan	Perencanaan	Perencanaan
3	Strata Pendidikan Minimal	S-1/D-4	S-1/D-4	S-1/D-4
4	Golongan	III/a	III/a	III/a
5	Batasan Usia Maksimal	2 tahun sebelum pensiun	5 tahun sebelum pensiun	2 tahun sebelum pensiun
6	Ketentuan Khusus	--	Membuat proposal sesuai topik yang dipilih (dalam bahasa Inggris)	--

PROSEDUR PELAKSANAAN



JADWAL PELAKSANAAN

PROGRAM PELATIHAN	JADWAL
PELATIHAN TEKNIS (DALAM NEGERI)	
• Pelatihan *City Planning*	Mei s.d. September 2021
• Pelatihan *Monitoring* dan Evaluasi	
• Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran	
• Pelatihan KPBU/PPP	
• Pelatihan PPD-RPJMD	
• Pelatihan Perencanaan Lingkungan	
• Pelatihan Perencanaan Pengelolaan Bencana	
• Pelatihan Kelayakan Proyek	
• Pelatihan LERD	
• Pelatihan PPD	
• Pelatihan Renstra	
PELATIHAN LUAR NEGERI	
• *Staff Enhancement Waste Management*	Juni 2021
• *Staff Enhancement* LERD	Juni 2021
• *Staff Enhancement Urban Planning*	Agustus 2021
• Forum Ilmiah Internasional	September/Oktober/November 2021
• *Academic Exchange*	September/Oktober/November 2021

* Jika terjadi perubahan jadwal, akan diinformasikan melalui situs *web* Pusbindiklatren Bappenas

BEASISWA PROGRAM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA (JFP)

PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA AHLI PERTAMA

UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

***WORKSHOP* PENILAIAN ANGKA KREDIT (PAK)**

***WORKSHOP* ADMINISTRASI PENILAIAN ANGKA KREDIT (APAK)**



PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA DAN UJI KOMPETENSI

PROGRAM

1. PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA AHLI PERTAMA

Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertujuan memberikan pengayaan substansi perencanaan pembangunan bagi PNS yang telah diangkat menjadi Perencana Ahli Pertama. Tujuan khusus pelatihan meliputi kompetensi kognitif, *skills*, dan *attitude* sebagai perencana profesional. Pelatihan dilaksanakan selama tujuh minggu dengan materi meliputi teknis perencanaan pembangunan, perencanaan spesifik: ekonomi, sosial, dan spasial, dan perilaku profesi perencana.

2. UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

Uji Kompetensi diperuntukkan bagi perencana yang akan menduduki jabatan setingkat lebih tinggi dan/atau perpindahan jabatan dari jabatan lain ke dalam JFP. Uji Kompetensi berlangsung selama 120 menit terdiri atas kompetensi teknis, manajerial, dan sosio-kultural.

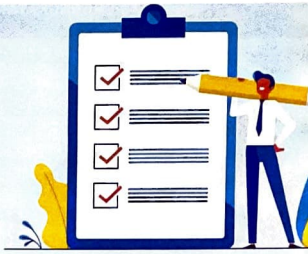
Mengacu pada PERMENPANRB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, tidak ada lagi syarat pelatihan untuk menduduki jabatan fungsional. Namun, Uji Kompetensi tetap merupakan salah satu syarat untuk menduduki jabatan fungsional. Kewajiban mengikuti dan lulus Uji Kompetensi diperuntukkan bagi perencana yang akan naik jabatan ke satu jenjang lebih tinggi, yaitu ke Perencana Ahli Muda, ke Perencana Ahli Madya dan ke Perencana Ahli Utama, serta bagi PNS yang akan diangkat menjadi perencana melalui jalur perpindahan jabatan dari jabatan lain.

PELAKSANA PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Syiah Kuala (FEB Unsyiah)
2. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Universitas Indonesia (LPEM UI)
3. Magister Administrasi Publik,Universitas Gadjah Mada (MAP UGM)
4. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada (MPWK UGM)
5. Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan, Universitas Hasanuddin (P2KP Unhas)
6. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung (MPWK ITB)
7. Magister Ekonomi Terapan, Universitas Padjadjaran (MET Unpad)
8. *Research Centre for Conflict and Policy*, Universitas Brawijaya (RCCP UB)
9. Program Pascasarjana, Universitas Sriwijaya (PPs Unsri)



PERSYARATAN UMUM PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA DAN UJI KOMPETENSI



1. Pendidikan minimal strata 1 (S-1) atau diploma 4 (D-4) dari semua disiplin ilmu.
2. Berasal dari unit kerja perencanaan.
3. PNS 100% dengan masa kerja 1 tahun (sejak menjadi PNS 100%).
4. Batas usia setinggi-tingginya pada saat mengikuti Uji Kompetensi adalah
   - 51 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional perencana ahli pertama dan ahli muda;
   - 53 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional perencana ahli madya; dan
   - 58 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional perencana ahli utama. Bagi JPT yang akan melakukan perpindahan jabatan juga mengikuti ketentuan Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor. B-143/M.Setneg/D-3/AP.01/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dapat diunduh melalui **bit.ly/setneg-b143-2018**
5. PNS pindah jabatan selain butir (4) di atas, juga harus melampirkan surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan, sekurang-kurangnya 2 tahun yang diketahui oleh atasan langsungnya minimal Pejabat Eselon II.
6. Surat usulan harus ditandatangani oleh serendah-rendahnya Pejabat Eselon II yang bertanggung jawab menangani kepegawaian.
7. Bagi Perencana yang akan naik jabatan selain butir (6) di atas, juga wajib melampirkan selain SK pengangkatan ke dalam JFP dan salinan Penetapan Angka Kredt (PAK) terakhir.
8. Menyertakan surat pernyataan formasi kebutuhan jabatan fungsional perencana dari kepegawaian.
9. Melampirkan surat rekomendasi dari pengelola kepegawaian perihal pengangkatan dalam JFP selambat-lambatnya 6 bulan sejak persyaratan untuk naik pangkat/jabatan telah terpenuhi.
10. Melampirkan surat pernyataan dari pengelola kepegawaian yang menyatakan bahwa sudah tidak ada alumni pelatihan fungsional perencana yang belum diangkat dalam JFP.
11. Mengisi dan melengkapi data-data sesuai dengan formulir isian daring yang ada di situs *web* Pusbindiklatren Bappenas dan mengirim berkas kelengkapan pendaftaran pelatihan.
12. Bagi para calon peserta yang sudah pernah mendaftar pada tahun sebelumnya, tetapi belum terpanggil, silahkan mendaftar kembali dan melengkapi dokumen sesuai ketentuan dan persyaratan di atas.
13. Dokumen kelengkapan persyaratan pelatihan yang tidak lengkap dianggap tidak memenuhi syarat administrasi dan tidak akan diproses lebih lanjut.

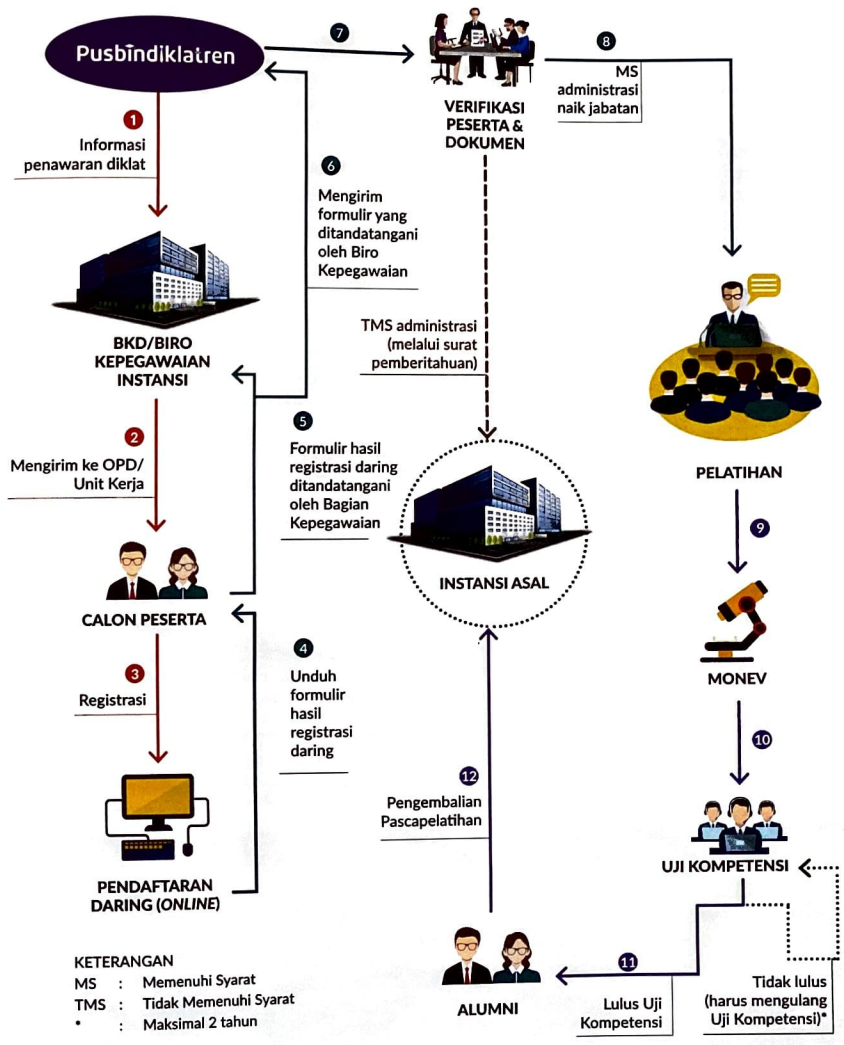
PERSYARATAN KHUSUS PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA

	PENGANGKATAN PERTAMA KALI	PENGANGKATAN PINDAH JABATAN
Pangkat/Golongan (minimal)	Penata Muda (III/a) atau Penata Muda Tingkat I (III/b)	Minimal Penata Muda Tingkat I (III/b)
Asal PNS	CPNS Formasi Perencana	Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas dan Pelaksana/Fungsional lain
Syarat Pengangkatan	Langsung diangkat setelah PNS 100%	Mengikuti dan lulus uji kompetensi Fungsional Perencana Ahli Muda, Ahli Madya atau Ahli Utama
Syarat Lainnya	Diberi waktu maksimal 3 tahun untuk mengikuti pelatihan fungsional perencana ahli pertama setelah diangkat dalam Fungsional Perencana Ahli Pertama	Batas usia pengangkatan 5 tahun menjelang Batas Usia Pensiun (BUP)
Lampiran	SK Pengangkatan Fungsional Perencana Ahli Pertama	Memiliki pengalaman minimal 2 tahun di unit kerja perencanaan (dibuktikan dengan surat keterangan)

PERSYARATAN KHUSUS UJI KOMPETENSI

	FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA		FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MADYA		FUNGSIONAL PERENCANA AHLI UTAMA	
	Pindah Jabatan	Naik Pangkat/ Jabatan	Pengangkatan Pertama/Pindah Jabatan	Naik Pangkat/ Jabatan	Pengangkatan Pertama/ Pindah Jabatan	Naik Pangkat/ Jabatan
Pangkat/ Golongan (minimal)	Penata (III/c) atau Penata Tingkat 1 (III/d)	Penata Muda Tingkat 1 (III/b)	Pembina (IV/a), Pembina Tingkat 1 (IV/b), atau Pembina Utama Muda (IV/c)	Penata Tingkat 1 (III/d)	Pembina Utama Madya (IV/d) atau Pembina Utama (IV/e)	Pembina Utama Muda (IV/c)
Angka Kredit/AK (minimal)	-	90% (90 AK)	-	90% (180 AK)	-	90% (405 AK)
AK Minimal Unsur Penunjang	-	6 AK	-	12 AK	-	-
Hasil Kerja Minimal (HKM)				Publikasi *Policy Paper*		Publikasi *Policy Paper* nasional/ internasional
Syarat Pengangkatan	Mengikuti dan lulus uji kompetensi JFP Ahli Muda	Mengikuti dan lulus uji kompetensi JFP Ahli Muda	Mengikuti dan lulus uji kompetensi JFP Ahli Madya	Mengikuti dan lulus uji kompetensi JFP Ahli Madya	Mengikuti dan lulus uji kompetensi JFP Ahli Utama	Mengikuti dan lulus uji kompetensi JFP Ahli Utama
Lampiran	Surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan minimal 2 tahun (dibuktikan dengan surat keterangan)	-	Surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan minimal 2 tahun (dibuktikan dengan surat keterangan)	-	Surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan minimal 2 tahun (dibuktikan dengan surat keterangan)	-

PROSEDUR PELAKSANAAN PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA



- Pada hari terakhir Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama akan diadakan Uji Kompetensi.
- Untuk menduduki Perencana Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama, tidak perlu mengikuti Pelatihan Fungsional Perencana, tetapi langsung mengikuti Uji Kompetensi.

WORKSHOP PENDUKUNG JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

PROGRAM

1. ***WORKSHOP* PENILAIAN ANGKA KREDIT (PAK)**
   Workshop yang ditujukan bagi para anggota tim penilai dan calon yang akan diangkat sebagai anggota tim penilai angka kredit perencana untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keahlian, dan wawasan bagi Tim Penilai terhadap unsur kegiatan perencanaan, pengembangan profesi, dan penunjang. Selain itu, *Workshop* PAK juga bertujuan untuk menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir bagi para anggota Tim Penilai dalam penilaian angka kredit. *Workshop* PAK berlangsung selama **5 hari**.
2. ***WORKSHOP* ADMINISTRASI PENILAIAN ANGKA KREDIT PERENCANA (APAK)**
   Workshop yang ditujukan bagi para anggota sekretariat dan calon yang akan diangkat sebagai anggota sekretariat tim penilai angka kredit perencana untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan wawasan bagi sekretariat terhadap penatausahaan dan tata cara pengadministrasian penilaian Angka Kredit Perencana. Selain itu, *Workshop* APAK juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan perilaku dalam pengadministrasian penilaian angka kredit perencana. *Workshop* APAK berlangsung selama **3 hari**.

PERSYARATAN UMUM

1. Surat usulan ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab menangani kepegawaian minimal Pejabat Eselon II;
2. Mengisi dan melengkapi data-data sesuai dengan formulir isian daring yang ada di laman www.pusbindiklatren.bappenas.go.id;
3. Melampirkan salinan SK PNS dan Ijazah terakhir;
4. Mengirimkan berkas kelengkapan pendaftaran diklat sebagai berikut: untuk butir (1) dan (2) adalah dokumen asli sedangkan butir (3) adalah salinan/fotokopi dokumen (data yang tidak lengkap dianggap tidak memenuhi syarat administrasi dan tidak akan diproses lebih lanjut).

PERSYARATAN KHUSUS

PERSYARATAN	*WORKSHOP* PAK	*WORKSHOP* APAK
Peserta	Para anggota/calon anggota Tim Penilai Angka Kredit Perencana, Pejabat Fungsional Perencana, dan Pejabat Struktural di unit perencanaan, kepegawaian/SDM.	Berasal dari para anggota/calon anggota Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Perencana, Pejabat Fungsional Perencana, dan Pejabat Struktural di unit perencanaan, kepegawaian/SDM.
Pendidikan Minimal	S1	SLTA
Pangkat/Golongan Minimal	Penata (III/c)	Pengatur Muda (II/a)
Usia Maksimal	50 tahun (pada tahun *workshop* berjalan)	50 tahun (pada tahun *workshop* berjalan)
Ketentuan Khusus	Khusus peserta yang berasal dari Pejabat Fungsional Perencana/Anggota Tim Penilai Angka Kredit Perencana, usia maksimal 55 tahun pada tahun workshop berjalan	-

JADWAL KEGIATAN

PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA AHLI PERTAMA DAN UJI KOMPETENSI

Batas Akhir Pendaftaran	12 Maret 2021
Pelaksanaan Pelatihan FP Ahli Pertama	April—November 2021
Pelaksanaan Uji Kompetensi	April—November 2021

***WORKSHOP* PAK DAN *WORKSHOP* APAK**

Pelaksanaan Gelombang I	April 2021
Pelaksanaan Gelombang II	Agustus 2021

Keterangan: Jika terjadi perubahan jadwal, akan diinformasikan di situs *web* Pusbindiklatren bappenas

PEMBIAYAAN

- Pelatihan Fungsional Perencana, Uji Kompetensi, dan *Workshop* PAK/APAK diselenggarakan dengan mekanisme dalam jaringan (daring)/*online*.
- *Tuition fee* dan paket data peserta konsumsi selama pelatihan ditanggung oleh Pusbindiklatren Bappenas.
- Uji kompetensi: biaya bahan, sewa ruang *meeting virtual*, dan pengawas ditanggung oleh Pusbindiklatren Bappenas.
- Instansi menanggung biaya lainnya selain yang ditanggung oleh Pusbindiklatren Bappenas.
- Khusus untuk Pelatihan Fungsional Perencana dimungkinkan juga menggunakan sistem pembiayaan mandiri.



PENDAFTARAN PROGRAM BEASISWA

PUSBINDIKLATREN BAPPENAS

Lengkapi seluruh dokumen pendukung yang disyaratkan

Daftar secara daring di situs *web* Pusbindiklatren Bappenas atau melalui tautan **bit.ly/simdiklat-pusbin**

Cetak formulir pendaftaran yang diperoleh dari situs *web* pendaftaran daring.

Kirim formulir pendaftaran dan dokumen pendukung via pos ke **Gedung Pusbindiklatren Bappenas, Jalan Proklamasi 70, Jakarta Pusat 10320**

Info Lebih Lanjut, Hubungi:

021-319 28280
021-319 28285
021-319 28279

pusbindiklatren@bappenas.go.id

IKUTI KLINIK ASN PERENCANA

Klinik ASN Perencana adalah sarana bagi para ASN Perencana di instansi pusat dan daerah untuk berkonsultasi mengenai berbagai hal yang terkait dengan **Jabatan Fungsional Perencana** secara umum, serta **program pendidikan dan pelatihan perencana** yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pusbindiklatren Bappenas.

Klinik ASN Perencana akan dilaksanakan secara rutin **dua minggu sekali** setiap bulannya pada hari **Jumat pukul 14.00—16.00 WIB** dengan tema yang telah ditentukan. Pelaksanaan dilakukan secara daring.



INFO LENGKAP DAN PENDAFTARAN:

bit.ly/klinik-perencana